

DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI TIMTENG

Abdul Hadi

As-Syafiiyah Islamic University, Jakarta, Indonesia.

abdulhadi.fai@uia.ac.id

<https://orcid.org/0009-0002-4561-3807>

Abstrak:

Timur Tengah, wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, adalah tempat lahirnya beberapa peradaban tertua serta agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme. Hubungan antara Islam dan demokrasi di wilayah ini telah menjadi topik perdebatan yang kompleks. Banyak negara di Timur Tengah berada di bawah rezim otoriter yang menggunakan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Namun, gelombang protes Arab Spring menunjukkan aspirasi kuat masyarakat untuk perubahan politik dan penerapan demokrasi. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi di Timur Tengah. Beberapa pemikir Islamis berargumen bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendukung demokrasi, sementara yang lain melihat demokrasi sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Faktor-faktor eksternal seperti intervensi asing dan konflik regional juga mempengaruhi dinamika politik di wilayah ini. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan studi literatur terhadap sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Islam dan demokrasi sangat bergantung pada interpretasi teks-teks keagamaan dan konteks sosial-politik. Gerakan Islamis menunjukkan variasi dalam pendekatan mereka terhadap demokrasi, dengan beberapa mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sementara yang lain menolaknya. Tantangan struktural seperti otoritarianisme dan ketidaksetaraan ekonomi juga menghambat proses demokratisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dibutuhkan pendekatan holistik dan kontekstual untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi, dengan menghargai nilai-nilai lokal sekaligus mendorong prinsip-prinsip demokrasi universal. Penelitian lebih lanjut dan dialog berkelanjutan antara pemikir, aktivis, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk mendukung demokratisasi di Timur Tengah

Keywords: demokrasi, Islamic value, shura, konsensus

Latar Belakang

Timur Tengah, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, merupakan tempat kelahiran beberapa peradaban tertua di dunia serta agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme. Islam, sebagai agama mayoritas di kawasan ini, memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Namun, hubungan antara Islam dan demokrasi di Timur Tengah telah menjadi topik perdebatan yang kompleks dan dinamis selama beberapa dekade terakhir.

Selama bertahun-tahun, banyak negara di Timur Tengah berada di bawah rezim otoriter yang sering menggunakan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaannya.¹ Meskipun demikian, aspirasi untuk demokrasi tidak pernah sepenuhnya padam di kalangan masyarakat. Gelombang protes yang dikenal

¹ Kompas Media, (2020, December 5). *Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011)*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/165128669/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>

sebagai Arab Spring pada tahun 2010-an menunjukkan adanya keinginan kuat di kalangan rakyat untuk perubahan politik dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi.²

Namun, upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Beberapa kelompok Islamis melihat demokrasi sebagai sistem yang sejalan dengan ajaran Islam, menekankan pada konsep musyawarah (konsultasi) dan keadilan. Mereka berargumen bahwa Islam dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk demokrasi, dan bahwa prinsip-prinsip Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok yang menentang demokrasi, melihatnya sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa penerapan demokrasi dapat mengancam identitas Islam dan merusak tatanan sosial yang telah ada. Perdebatan ini seringkali memperlihatkan ketegangan antara modernitas dan tradisi, serta antara kekuatan lokal dan pengaruh global. Selain itu, dinamika politik di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti intervensi asing, konflik regional, dan kebijakan internasional. Intervensi militer dan dukungan dari kekuatan asing sering kali memperumit proses demokratisasi dan memperburuk ketidakstabilan di wilayah ini.³

Upaya untuk menghadirkan Islam dalam kehidupan, namun mengabaikan sistem demokrasi sebagai salah satu cara dalam mengatur masyarakat, dan sebagai nilai dalam menggerakkan mereka, pada hakekatnya telah melalaikan tujuan utama dari syariah (maqosid syariah), dan merusak nilai-nilai kebebasan dalam kehidupan, padahal kebebasan itu sendiri sebagai icon utama dalam risalah Islam. Kalangan muslim yang menolak Demokrasi sebenarnya karena merasa takut dapat merusak batas-batas halal dan haram, sehingga mereka lebih mencari alternatif lain dengan men-syiarkan istilah As-Syura, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan fungsi utama dalam Demokrasi, namun dalam scope dan batasannya.

Melalui artikel ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai pemikiran dan pandangan tentang Islam dan demokrasi di Timur Tengah, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang ada. Dengan mengkaji berbagai aktor, gerakan, dan dinamika sosial-politik, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat berinteraksi dan berkembang di salah satu wilayah paling dinamis di dunia.

Kajian Teori

Penelitian mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi di Timur Tengah telah menarik perhatian banyak akademisi dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa studi penting telah mengkaji berbagai aspek dari dinamika ini, termasuk pemikiran politik Islam, gerakan Islamis, dan proses demokratisasi di wilayah tersebut.

Pemikiran Politik Islam dan Demokrasi Esposito, John L. dan Voll, John O. dalam bukunya *Islam and Democracy* (1996), membahas kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, menekankan pada konsep-konsep seperti shura (konsultasi) dan ijma (konsensus) yang dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka berargumen bahwa banyak nilai-nilai demokrasi dapat ditemukan dalam

² Vaughan, K. R., Froese, P., & Lonas, C. (2022). Was the Arab Spring a Post-Islamist Moment? ; Winners and Winners in Egypt, Libya, and Tunisia. *Comparative Sociology*, 21(2), 248–274. <https://doi.org/10.1163/15691330-bja10052>

³ <https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/28093/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7>

tradisi Islam.⁴ **Soroush, Abdolkarim** dalam tulisannya *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (2000) membahas interpretasi modern tentang Islam yang mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat. Soroush menekankan pentingnya penafsiran ulang teks-teks keagamaan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman modern.⁵

Gerakan Islamis dan Demokrasi Bayat Asef dalam *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (2013) menggambarkan transformasi gerakan Islamis dari fokus pada pendirian negara Islam menuju penerimaan konsep-konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Bayat memperkenalkan konsep "post-Islamisme" sebagai fase di mana gerakan-gerakan Islamis berusaha mengakomodasi nilai-nilai demokrasi.⁶ **Roy, Olivier** dalam bukunya *The Failure of Political Islam* (1994) meneliti kegagalan beberapa gerakan Islamis dalam mencapai tujuan politik mereka dan bagaimana hal ini mendorong beberapa di antaranya untuk mengevaluasi kembali sikap mereka terhadap demokrasi dan keterlibatan politik.⁷

Proses Demokratisasi di Timur Tengah Stepan, Alfred dan Robertson, Graeme B. dalam *Democratization and Islam* (2003) mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses demokratisasi di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Timur Tengah. Mereka menyoroti peran aktor-aktor domestik dan internasional dalam mendukung atau menghambat proses tersebut.⁸ **Diamond, Larry** dalam artikelnya *Why Are There No Arab Democracies?* (2010) mengkaji hambatan-hambatan struktural dan budaya yang menghalangi proses demokratisasi di negara-negara Arab. Diamond menyoroti peran otoritarianisme, kurangnya institusi demokratis, dan dinamika sosial-ekonomi sebagai faktor-faktor utama.⁹

Pengaruh Eksternal dan Konflik Regional. Anderson, Lisa dalam *The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980* (1986) membahas bagaimana intervensi asing dan konflik regional mempengaruhi stabilitas politik dan proses demokratisasi di Timur Tengah. Anderson berpendapat bahwa keterlibatan asing sering kali memperumit dinamika politik domestik.¹⁰ **Hinnebusch, Raymond** dalam *The International Politics of the Middle East* (2003) mengkaji bagaimana kebijakan luar negeri negara-negara besar mempengaruhi politik domestik di Timur Tengah. Hinnebusch menyoroti bagaimana intervensi militer dan dukungan politik dari kekuatan asing dapat mempengaruhi arah demokratisasi di kawasan ini.¹¹

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi di Timur Tengah merupakan topik yang kompleks dan multifaset. Berbagai studi telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemikiran Islam, gerakan politik, proses demokratisasi, dan pengaruh eksternal berinteraksi dalam membentuk dinamika politik di wilayah ini. Artikel ini akan melanjutkan eksplorasi tersebut dengan fokus pada perkembangan terbaru dan perspektif kritis terhadap masa depan demokrasi di Timur Tengah

⁴ John Esposito, 1996 - *Islam and Democracy* | Download Free PDF | Islamism | Democratization. (n.d.). Scribd. Retrieved July 8, 2024, from <https://id.scribd.com/document/485211838/Esposito-John-1996-Islam-and-Democracy>.

⁵ A. Sadri, (2000). *Reason, Freedom, & Democracy in Islam*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195128123.001.0001>

⁶ A. Bayat (Ed.). (2013). *Post-Islamism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199766062.001.0001>

⁷ Roy, O. (1995). The Failure of Political Islam. *The Journal of Asian Studies*, 54, 518 - 520.

⁸ "Alfred Stepan, Demokrasi, dan Islam – CRCS UGM." <https://crccs.ugm.ac.id/alfred-stepan-demokrasi-dan-islam/>.

⁹ Larry Diamond (2015). *In Search of Democracy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315685175>

¹⁰ Anderson (1986). The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980. In *JSTOR*. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7ztg5k>

¹¹ Hinnebusch (2015). *The international politics of the Middle East: Second edition*. Manchester University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1mf71rg>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan nuansa konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan demokrasi di wilayah ini.¹² Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis berbagai negara di Timur Tengah. Studi kasus komparatif memungkinkan analisis mendalam terhadap konteks spesifik tiap negara serta perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi.¹³ Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk: **Studi Literatur:** Mengkaji literatur akademik yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas pemikiran Islam, demokrasi, dan dinamika politik di Timur Tengah. **Analisis Dokumen:** Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. **Analisis Data Interpretasi dan analisa konten:** Menafsirkan temuan-temuan dengan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang ada. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, termasuk keterbatasan akses ke beberapa sumber data. Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah, serta menyumbangkan wawasan yang dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan diskusi akademik di masa depan.

Temuan Penelitian dan Pembahasanya

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan kunci terkait dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah, yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data seperti berikut:

1. Kompatibilitas Islam dan Demokrasi

Banyak pemikir dan aktivis Islam di Timur Tengah melihat bahwa prinsip-prinsip Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi. Beberapa konsep seperti shura (konsultasi) dan ijma (konsensus) dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi dan penerapan konsep-konsep ini di berbagai negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Islam dan demokrasi sangat bergantung pada interpretasi teks-teks keagamaan dan konteks sosial-politik. Pemikir-pemikir progresif cenderung menekankan aspek-aspek inklusif dan egaliter dalam Islam yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, interpretasi konservatif sering kali menekankan aspek-aspek hukum dan otoritas yang dianggap kurang sesuai dengan demokrasi liberal. . Islam compatible dengan demokrasi tidak hanya dalam konsep As Syura,

¹² Sholikha Syahidah, W. N., & Anwar, N. (2023). Metodologi Studi Islam: Tinjauan Filosofis, Sejarah, dan Teologis dalam Pencarian Kebenaran Keagamaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26557–26565. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10894>

¹³ Salmaa. (2022, August 8). *Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif>

al-Adl, dan al-Musawat, tapi juga dalam bentuk contoh dan praktek nyata dalam kehidupan dalam bernegara¹⁴

2. Gerakan Islamis dan Demokratisasi

Gerakan Islamis di Timur Tengah menunjukkan variasi dalam pendekatan mereka terhadap demokrasi. Beberapa kelompok seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Ennahda di Tunisia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam platform politik mereka. Namun, ada juga kelompok yang menolak demokrasi, melihatnya sebagai produk Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Variasi dalam pendekatan gerakan Islamis terhadap demokrasi mencerminkan beragamnya konteks politik dan sosial di Timur Tengah. Gerakan-gerakan yang beroperasi di lingkungan yang lebih terbuka dan toleran terhadap pluralisme politik cenderung lebih berhasil dalam mengadopsi demokrasi. Sebaliknya, di negara-negara dengan kontrol ketat terhadap oposisi politik, gerakan Islamis lebih cenderung mengadopsi pendekatan yang konfrontatif. Demokrasi sudah tentu merupakan sebuah proses kompleks, terutama bagi negara yang belum pernah mengenal demokrasi sebelumnya. Bagi negara-negara Arab, demokrasi tentunya merupakan konsep yang abstrak. Selama lebih dari 40 tahun, Irak, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, telah hidup dibawah sistem otoriter. Namun perludipahami bahwa sekalipun Islam sering dikontraskan dengan demokrasi, sejatinya tidak adakontradiksi inheren mengenai keduanya (Cook & Stathis 2013:177). Islam dan demokrasi bukan tidak mungkin untuk disandingkan selama memenuhi prinsip dasar yang diperlukan yakni dengan meletakkan Islam sebagai dasar hukum dan agama nasional, namun tidak menciptakan hukum yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁵

3. Pengaruh Faktor Eksternal

Intervensi asing dan kebijakan luar negeri dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia memiliki dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di Timur Tengah. Dukungan politik dan militer sering kali mempengaruhi stabilitas politik dan arah kebijakan domestik, baik secara positif maupun negatif. Intervensi asing sering kali membawa dualitas dalam proses demokratisasi di Timur Tengah. Di satu sisi, dukungan asing bisa memberikan bantuan penting bagi gerakan pro-demokrasi. Di sisi lain, intervensi militer dan politik dari luar sering kali memperburuk ketidakstabilan dan memicu resistensi lokal terhadap demokratisasi yang dianggap sebagai agenda asing. . semua konflik yang terjadi di suatu negara pada era perang dingin pasti melibatkan dua negara: Amerika

¹⁴ . Zuhrah, F., & Keislaman, M. J. I. (n.d.). ISLAM DAN DEMOKRASI: HUBUNGAN DAN KOMPATIBILITAS. *Www.academia.edu*. Retrieved July 9, 2024, from https://www.academia.edu/31539193/ISLAM_DAN_DEMOKRASI_HUBUNGAN_DAN_KOMPATIBILITAS.

¹⁵ Yasmine, S. E. (2016). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 106–113. <https://doi.org/10.20473/mkp.V28I22015.106-113>

Serikat dan Uni Soviet. Hampir semua konflik di Timur Tengah – yang sebagian bahkan masih berlangsung hingga hari ini – dipengaruhi dan diintervensi oleh dua negara ini.¹⁶

4. Tantangan Struktural

Beberapa tantangan struktural menghambat proses demokratisasi di Timur Tengah. Faktor-faktor seperti otoritarianisme, kurangnya institusi demokratis yang kuat, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik etnis dan sektarian merupakan hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh negara-negara di Timur Tengah memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk diatasi. Reformasi politik harus disertai dengan pembangunan institusi demokratis yang kuat, pengentasan kemiskinan, dan upaya rekonsiliasi etnis dan sektarian untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi. Transisi demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, tersandera oleh kepentingan-kepentingan sektarian: suku, agama, mazhab dan kelompok politik. Sektarianisme menjadi salah satu penyebab instabilitas dan telah mewarnai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Secara sosio-historis sektarianisme di Timur Tengah memiliki akar yang berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panjang.¹⁷

5. Peran Media dan Teknologi

Media sosial dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide demokratis dan memobilisasi gerakan pro-demokrasi, terutama selama Arab Spring. Namun, kontrol pemerintah terhadap media tradisional dan internet juga digunakan untuk menghambat gerakan oposisi. Peran media dan teknologi informasi dalam mendukung demokrasi di Timur Tengah tidak bisa diabaikan. Media sosial telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Namun, kontrol pemerintah terhadap media juga menunjukkan perlunya kebijakan yang melindungi kebebasan pers dan akses informasi. Globalisasi telah membawa masyarakat modern hidup dalam era teknologi informasi atau yang disebut dengan era revolusi industri 5.0, artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan sosial. Dampak globalisasi telah membawa semua aspek kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih cepat, namun disisi lain bisa menghambat terwujudnya hal tersebut jika ditemukan pengekangan terhadap media sosial dan teknologi tersebut.¹⁸

Temuan dan pembahasan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah, serta menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam

¹⁶ *Intervensi Asing : Sebuah Ancaman - PinterPolitik.com*. (2017, June 11). <https://www.pinterpolitik.com/.https://www.pinterpolitik.com/in-depth/intervensi-asing>

¹⁷ Yasmine, S. E. (2016). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 106–113. <https://doi.org/10.20473/mkp.V28I22015.106-113>

¹⁸ Peran Teknologi dalam Partisipasi Politik | GEOTIMES. (2023, November 8). *Peran Teknologi dalam Partisipasi Politik* | GEOTIMES. GEOTIMES. <https://geotimes.id/opini/peran-teknologi-dalam-partisipasi-politik>

mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam konteks politik yang beragam dan sering kali tidak stabil.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengeksplorasi dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah, sebuah wilayah yang dikenal dengan kompleksitas sosial, politik, dan budayanya. Melalui analisis literatur, dokumen resmi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, beberapa temuan kunci telah diidentifikasi yang memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi di kawasan ini. Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai pandangan mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi di Timur Tengah. Sementara beberapa pemikir dan aktivis melihat nilai-nilai Islam dan demokrasi sebagai saling melengkapi, ada juga kelompok yang menolak demokrasi sebagai konsep yang berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya interpretasi kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dan pengaruh kondisi sosial-politik. Selain itu, Gerakan-gerakan Islamis di Timur Tengah menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap demokrasi. Beberapa gerakan telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan berpartisipasi dalam proses politik, sementara yang lain tetap skeptis atau bahkan menentang demokrasi. Faktor-faktor seperti keterbukaan politik, tekanan domestik, dan pengaruh eksternal memainkan peran penting dalam menentukan sikap dan strategi gerakan-gerakan ini. Intervensi asing dan kebijakan luar negeri dari kekuatan besar telah memiliki dampak yang ambigu terhadap proses demokratisasi di Timur Tengah. Dukungan politik dan militer dari negara-negara besar sering kali membantu gerakan pro-demokrasi, tetapi juga dapat memperburuk ketidakstabilan dan menimbulkan resistensi terhadap perubahan yang dianggap sebagai agenda asing. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dan sensitif terhadap dinamika lokal dalam mendukung demokratisasi di kawasan ini. Hal lain yang ditemukan adalah tantangan struktural seperti otoritarianisme, kurangnya institusi demokratis yang kuat, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik etnis dan sektarian terus menjadi hambatan utama bagi proses demokratisasi di Timur Tengah. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya jangka panjang yang melibatkan reformasi politik, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan rekonsiliasi sosial. Media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam mendukung gerakan pro-demokrasi di Timur Tengah, terutama selama Arab Spring. Namun, kontrol pemerintah terhadap media tradisional dan internet juga menunjukkan bahwa kebebasan pers dan akses informasi masih menjadi isu kritis yang perlu ditangani untuk mendukung proses demokratisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi, diperlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual yang menghargai nilai-nilai lokal sekaligus mendorong prinsip-prinsip demokrasi universal. Penelitian lebih lanjut dan dialog berkelanjutan antara pemikir, aktivis, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan strategi yang efektif dalam mendukung demokratisasi di Timur Tengah.

Impact dan rekomendasi

A. Impact:

1. Terhadap Politik dan Pemerintahan

Dinamika pemikiran Islam dan demokrasi di Timur Tengah memiliki dampak signifikan terhadap politik dan pemerintahan di wilayah tersebut. Adopsi prinsip-prinsip demokrasi oleh beberapa gerakan

Islam menunjukkan potensi untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif. Namun, penolakan terhadap demokrasi oleh kelompok-kelompok tertentu juga dapat memperkuat otoritarianisme dan memperburuk ketidakstabilan politik.

2. Terhadap Hubungan Internasional

Kebijakan luar negeri dan intervensi asing dalam proses demokratisasi di Timur Tengah memiliki implikasi besar terhadap hubungan internasional. Dukungan dari negara-negara besar terhadap gerakan pro-demokrasi bisa meningkatkan legitimasi internasional dan bantuan ekonomi, namun juga dapat menimbulkan resistensi dari pemerintah lokal dan aktor non-negara yang melihatnya sebagai campur tangan asing.

3. Terhadap Masyarakat Sipil

Peran aktif masyarakat sipil, terutama melalui media sosial dan teknologi informasi, menunjukkan bahwa ada ruang untuk partisipasi publik dalam proses demokratisasi. Gerakan masyarakat yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia memperlihatkan potensi untuk mendorong perubahan sosial yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan dari pemerintah yang represif.

4. Terhadap Stabilitas Regional

Konflik dan ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang Islam dan demokrasi dapat mempengaruhi stabilitas regional. Perbedaan ideologis antara kelompok-kelompok politik dan agama bisa memicu konflik yang berkepanjangan dan menghambat upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

B. Rekomendasi:

- 1. Mendukung Dialog Inklusif;** Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik antara Islam dan demokrasi, sangat penting untuk mendukung dialog inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin agama, akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan. Dialog ini harus mendorong pertukaran pandangan yang konstruktif dan berupaya mencari titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi.
- 2. Memperkuat Institusi Demokratis;** Negara-negara di Timur Tengah perlu memperkuat institusi demokratis mereka, seperti sistem peradilan yang independen, parlemen yang representatif, dan media yang bebas. Reformasi institusi ini harus disertai dengan upaya untuk memastikan partisipasi politik yang lebih luas dari semua lapisan masyarakat.
- 3. Mendorong Pendidikan dan Kesadaran Publik;** Pendidikan dan kesadaran publik mengenai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia harus ditingkatkan. Kurikulum pendidikan perlu memasukkan materi yang mendorong pemahaman tentang demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Kampanye kesadaran publik melalui media dan organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses demokratisasi.
- 4. Mengurangi Ketergantungan pada Intervensi Asing;** Negara-negara di Timur Tengah harus berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada intervensi asing dalam proses politik domestik. Sementara dukungan internasional bisa membantu, penting untuk memastikan bahwa upaya demokratisasi didorong oleh aktor-aktor lokal yang memiliki legitimasi dan dukungan dari masyarakat.

5. Menyelesaikan Konflik dan Mendorong Rekonsiliasi; Upaya untuk menyelesaikan konflik etnis dan sektarian yang telah lama berlangsung di Timur Tengah harus menjadi prioritas. Proses rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak yang berkonflik dan mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan memungkinkan demokrasi berkembang.

6. Memanfaatkan Teknologi untuk Partisipasi Politik; Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik harus terus didorong. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mempromosikan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses politik. Dampak dan rekomendasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan multi fase dalam mendukung hubungan yang harmonis antara Islam dan demokrasi di Timur Tengah. Melalui langkah-langkah konkret dan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, diharapkan wilayah ini dapat mencapai stabilitas politik yang berkelanjutan dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Vaughan, K. R., Froese, P., & Lonas, C. (2022). Was the Arab Spring a Post-Islamist Moment? *Comparative Sociology*, 21(2), 248–274. <https://doi.org/10.1163/15691330-bja10052>
- Repository UMY, *DINAMIKA KONFLIK DI TIMUR TENGAH*. (n.d.). Retrieved July 8, 2024, from <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28093/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7>
- Esposito, John 1996 - *Islam and Democracy* | Download Free PDF | Islamism | Democratization. (n.d.). Scribd. Retrieved July 8, 2024, from <https://id.scribd.com/document/485211838/Esposito-John-1996-Islam-and-Democracy>.
- Sadri, A. (2000). *Reason, Freedom, & Democracy in Islam*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195128123.001.0001>
- Bayat, A. (Ed.). (2013). *Post-Islamism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199766062.001.0001>
- Alfred Stepan, *Demokrasi, dan Islam*. (n.d.). <https://crcs.ugm.ac.id>. Retrieved July 8, 2024, from <https://crcs.ugm.ac.id/alfred-stepan-demokrasi-dan-islam>
- Anderson, L. (1986). The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980. In JSTOR. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7ztg5k>
- Diamond, L. (2015). *In Search of Democracy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315685175>
- Roy, O. (1995). The Failure of Political Islam. *The Journal of Asian Studies*, 54, 518 - 520.
- Yasmine, S. E. (2016). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 106–113. <https://doi.org/10.20473/mkp.V28I22015.106-113>
- GEOTIMES. (2023, November 8). *Peran Teknologi dalam Partisipasi Politik* | GEOTIMES. <https://geotimes.id/opini/peran-teknologi-dalam-partisipasi-politik>
- Media, K. C. (2020, December 5). *Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011)*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/165128669/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>

